# LAPORAN TATA KELOLA
# PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI
# TAHUN 2023

KOMPLEK PASAR KAYUAMBUA DESA TIGA, KEC SUSUT, KAB BANGLI
EMAIL ; mitramuktijaya@yahoo.co.id
TELP /FAX 0366- 51403, 0366-5501009

Form A.00.00

# TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga Jasa Keuangan | : | PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri |
| Posisi Laporan | : | 31 Desember 2023 |
| Alamat | : | Komplek Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli |
| Nomor Telepon | : | 3665501009 |
| Penjelasan Umum | : | PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri merupakan lembaga keuangan yang didirikan atas kerjasama antara Kopkar Bank Yudha Bhakti dengan 5 (lima) KUD Mandiri yang ada di Kab. Bangli, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK,Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan.Laporan mengenai Self-Assessment telah diberikan kepada OJK dengan nilai predikat komposit 1.9 (Baik)  Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat , Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris cukup dipenuhi oleh Bank. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke OJK. |

# Form A.01.10
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | I Made Mujana | Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan diantaranya memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan |

| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris |
|---|
| Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi sudah sesuai dan sudah tertuang dalam Job desk Dewan Direksi |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Footer 2 |

# Form A.01.20
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. I Gusti Agung Anom Harsana,Ak | Komisaris Utama | Melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan pelaksanaan Rencana, Komisaris Utama bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada direksi |
| 2 | Dr. I Made Astrama, SE.,MM | Komisaris | Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar |

| Rekomendasi Kepada Direksi |
|---|
| Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dan sudah tertuang dalam Job desk Dewan Komisaris |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Footer 2 |

Form A.01.31

# Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## BPR tidak memiliki komite

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat tugas dan tanggung jawab komite |

Form A.01.32

# Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## BPR tidak memiliki komite

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite |

Form A.01.33

# Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## BPR tidak memiliki komite

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat program kerja dan realisasi program kerja komite |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Direksi tidak memiliki saham di BPR

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi pada BPR |

Form A.02.20

# Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain |

# Form A.03.10
# Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | I Made Mujana | I Made Mujana | tidak ada | tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR |

# Form A.03.20
# Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | I Made Mujana | I Made Mujana | tidak ada | tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak terdapat hubungan keluarga anggota direksi pada BPR |

Form A.04.10

# Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR |

# Form A.04.20
# Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak terdapat kepemilikan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain |

# Form A.05.10
# Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Drs. I Gusti Agung Anom Harsana,Ak | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Dr. I Made Astrama, SE.,MM | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak terdapat keuangan anggota dewan Komisaris pada BPR |

# Form A.05.20
# Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Drs. I Gusti Agung Anom Harsana,Ak | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Dr. I Made Astrama, SE.,MM | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR |

# Form A.06.10

# Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 1 | 9000000 | 2 | 8900000 |
| 2 | Tunjangan | 1 | 2125000 | 2 | 2900000 |
| 3 | Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | 11125000 | | 11800000 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tertuang dalam kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS |

# Form A.06.20
# Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|---|---|---|---|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Transportasi | Mobil Dinas Pribadi | tidak ada |
| 3 | Asuransi Kesehatan | BPJS | BPJS |
| 4 | Fasilitas lainnya | tidak ada | tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Terdapat fasilitas bagi Direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan dalam RUPS |

# Form A.07.00
# Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| | | Perbandingan | |
|---|---|---|---|
| No | Keterangan | (a/b) | 1 |
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 22,63 | 1 |
| 2 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 100,00 | 1 |
| 3 | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 74,81 | 1 |
| 4 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 60,67 | 1 |
| 5 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) | 31,77 | 1 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| jadwal Penggajian yang dibayarkan sudah sesuai |

# Form A.08.10
# Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|---|---|---|---|
| 1 | 21-02-2023 | 21 | Evaluasi Kinerja Januari |
| 2 | 12-05-2023 | 21 | Evaluasi Kinerja April |
| 3 | 15-06-2023 | 21 | Evaluasi Kinerja Mei |
| 4 | 05-07-2023 | 21 | Evaluasi Kinerja juni |
| 5 | 16-08-2023 | 21 | Evaluasi Kinerja juli |
| 6 | 12-09-2022 | 20 | Evaluasi Kinerja Agustus |
| 7 | 08-10-2023 | 22 | Evaluasi Kinerja September |
| 8 | 08-11-2023 | 20 | Evaluasi Kinerja Oktober |
| 9 | 13-12-2023 | 20 | Evaluasi Kinerja November |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Pelaksanaan rapat evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap bulan namun karena ada kendala dan kegiatan beberapa bulan tidak dilakukan rapat evaluasi namun untuk menyamakan persepsi hanya membuat laporan bulanan dan atau konfirmasi kinerja secara langsung ke direksi |

# Form A.08.20
# Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|---|---|---|---|---|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Drs. I Gusti Agung Anom Harsana,Ak | 9 | 0 | 100,00 |
| 2 | Dr. I Made Astrama, SE.,MM | 9 | 0 | 100,00 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Kehadiran Dewan Komisaris telah dibuatkan Bukukunjungan Dewan Komisaris dan diisi sesuai dengan kehadirannya |

# Form A.09.00
# Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Selama tahun pelaporan tidak terdapat Jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud) |

# Form A.10.00
# Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|---|---|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Terdapat permasalahn hukum yang dihadapi dimana terjadinya kesalah pahaman atas debitur dengan rekannya sehingga debitur melaporkan pihak bank dalam kasus pengelapan uang pencairan kredit debitur |

Form A.11.00

# Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan |

Form A.12.00

# Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik |

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | tidak ada |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | tidak ada |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | tidak ada |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | tidak ada |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | tidak ada |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.04.00
# Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 2 | sudah dilengkapi dan sudah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2 | tidak ada benturan kepentingan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 2 | Tidak ada benturan kepentingan yang perlu didokumentasikan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:<br>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br>c. mampu bekerja secara independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | 3 | Bank Telah memiliki Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan namun dengan meninggalnya Direktur utama(Direktur bisnis) maka untuk kelangsungan bank dalam pencairan kredit maka direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhannya melepas Jabatannya sebagai Fungsi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga Untuk tugas Yang membawahkan fungsi kepatuhan diambil alih oleh PE Kepatuhan |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 3 | Sudah Disesuaikan |
| 3 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | 1 | Sudah ada PE kepatuhan SK Dir.05/IX.2022/MBMM |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 2 | Sedang ditinjau dan diperbaharui |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 2 | sudah ada dan tertuang dalam Tugas dan wewenang satuan kerja kepatuhan |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 2,20 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai struktur | 1,10 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 2 | Sudah ditindaklanjuti |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 2 | Sudah ditindaklanjuti |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | Sudah dilakukan |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | sudah dilakukan pemantauan oleh PE dan akan ditingkatkan kembali |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | sedang dalam proses pengkinian dan evaluasi terhadap kebijakan/ketentuan yang terbaru |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 2 | sedang dalam proses |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2 | Akan ditingkatkan lagi |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Akan dilakukan apabila ada penyimpangan |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.06.00
# Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 2 | sudah memiliki PE Audit Intern SK Dir 04/IX.2022/MBMM |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 2 | sudah melakukan pengkinian |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 2 | sudah bersifat independen |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 2 | membuat laporan langsung ke Direksi dan Komisaris |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 2 | memanfaatkan SDM yang sudah ada dengan memberikan pendidikan tentang audit |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 2 | masih dalam proses penyempurnaan dan sudah melakukan pengkinian |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti kurang dari Rp, 50.000.000.000,- |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 3 | masih dalam proses penyempurnaan |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 3 | dengan melakukan pelatihan dan pendidikan baIK secara online maupun offline tentang spi |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,50 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | sudah, namum masih perlu ditingkatkan |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilaksanakan |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti kurang dari Rp, 50.000.000.000,- |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Sudah dilakukan dg SK Dir 08/VII.21/MBMM/Klr.BG |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.07.00

## Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1 | Sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 1 | Sudah dilaksanakan |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 1 | Sudah |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah |

# Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.07.00

## Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

# Form B.07.00

## Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.08.00

## Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | 2 | Sudah Dilaksanakan SK Dir.26/VII.2021/MBMM |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 2 | BPR Telah memiliki kebijakan/sop manajemen resiko |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 3 | sudah dilengkapi dan akan ditinjau kembali |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 2,33 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,17 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | 2 | sudah dilakukan dan akan ditingkatkan |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 5 | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2 | sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai dewan komisaris |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 2 | termuat dalam sop manajemen resiko |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 3 | sudah dilakukan dan akan ditingkatkan |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | masih perlu ditinjau dan ditingkatkan |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | masih akan ditingkatkan |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 2 | masih akan ditingkatkan |
| | Total nilai skala penerapan | 15 | |
| | Rata-rata | 2,14 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,86 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah dilakukan |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai Hasil | 0,15 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.09.00
# Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2 | tertuang dalam kebijakan kredit |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | masih dievaluasi dan akan ditingkatkan lagi |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | sudah dilaksanakan dan Akan ditingkatkan kembali |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Tidak ada pemberian kredit yang melampaui BMPK |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Tidak melampaui BMPK |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Form B.10.00
# Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 1 | Sudah disetujui |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilakukan |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 3 | perlu upaya-upaya dalam meningkatkan permodalan |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2 | sudah dilakukan |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 2 | sudah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Sudah dilakukn |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | Masih akan ditingkatkan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah melaporkan |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah melaporkan |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | masih akan ditingkatkan |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah mengikuti ketentuan OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilakukan dan akan ditingkatkan lagi dengan tepat waktu |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 2 | sudah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola**
**Pada PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri**

PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri merupakan lembaga keuangan yang didirikan atas kerjasama antara Kopkar Bank Yudha Bhakti dengan 5 (lima) KUD Mandiri yang ada di Kabupaten Bangli, Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disingkat BPR, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ. Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undang yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank. Tahun 2023 interaksi dan pelayanan kepada Nasabah, pemberian kredit yang lebih selektif dengan memperhatikan kondisi perekonomian atas kelompok usaha yang terdampak untuk memitigasi risiko kredit yang akan timbul dikemudian hari, dilakukannya penyesuaian kebijakan perkreditan dan hal lain yang dapat mengurangi risiko terhadap kelangsungan Bank sehingga Bank mampu mempertahankan eksistensinya dan menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Laporan mengenai Self-Assessment telah diberikan kepada OJK dengan nilai predikat komposit 1.9 (Baik) Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat , Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris cukup dipenuhi oleh Bank. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke OJK.

Disamping itu ada beberapa indikator yang dapat dijadikan kesimpulan dari laporan ini yaitu:

1. Aspek Struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan dengan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah di susun dan sudah diperbaharui. Namun Pada Penerapan Tata Kelola Bank di tahun 2023 masih terdapat kekosongan 1 direksi yang disebabkan karena Meninggalnya direktur utama pada bulan September 2023 dan masih dalam proses pengrekrutan 1 Direksi lagi dan sudah bersurat kepada Pemegang Saham, Untuk Proses yang menangani kredit telah ditetapkan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian kredit. Walaupun pada beberapa indikator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum telah mendukung dan memenuhi penerapan tata kelola PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri selama tahun 2023 dan masih perlunnya untuk dievaluasi dan ditingkatkan lagi. Meskipun Bank masih belum maksimal pencapaiannya baik dari segi Aset, Modal, Laba serta target Kredit namun dalam pelaksanaan setiap transaksi ataupun kegiatan operasional tetap melakukan pengukuran terhadap seluruh jenis risiko serta

mitigasi risiko namun masih perlu dalam peningkatan lagi terhadap penanganan risiko kredit khususnya penanganan kondisi rasio NPL dan terjadinya penurunan kualitas Debitur apabila tidak ditangani dengan baik Bank lebih selektif dalam menyalurkan kredit dan lebih fokus dalam penanganan kredit Debitur yang bermasalah.

2. Rangkaian proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan cukup baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap seluruh jenis risiko yang timbul namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan. Peran serta seluruh bagian pada Bank dalam mematuhi dan melaksanakan setiap transaksi dengan berpedoman pada prosedur, kebijakan dan peraturan internal yang telah ada dan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang undangan yang sedang berlaku dapat memaksimalkan pencapaian penerapan tata kelola.
3. Hasil dari penerapan Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola berkualitas yang dihasilkan dari setiap aspek struktur dan infrastruktur yang juga sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata kelola dapat berjalan dengan efektif. Sepanjang tahun 2023, BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, penyusunan dan pengkinian kebijakan BPR serta pemenuhan dan penyesuaian beberapa fungsi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Dengan tersedianya kebijakan terkini dan penyesuaian beberapa fungsi dimaksud, turut serta berperan penting dalam pelaksanaan Tata Kelola pada BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.

PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

| | |
|---|---|
| Drs. I Gusti Agung Anom Harsana, Ak | I Made Mujana |
| Komisaris Utama | Direktur |

# HALAMAN PERSETUJUAN
# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
# PT.BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI

Kami yang betanda tangan dibawah ini selaku Pengurus PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri menyatakan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2023

PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri

| | |
|---|---|
| Drs. I Gusti Agung Anom Harsana, Ak | I Made Mujana |
| Komisaris Utama | Direktur |